

**PERANAN GREENPEACE DALAM PENOLAKAN
PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG TAHUN 2011-2013**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

AGVIANA HARDINIA
NPM. 1044010009

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
PEMINATAN/KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
SURABAYA
2014**

LEMBAR PERNYATAAN

SKRIPSI

**PERANAN GREENPEACE DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN
PLTU DI BATANG TAHUN 2011-2013**

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis kecuali dituliskan dengan format kutipan dalam skripsi.

Surabaya, 24 Juni 2014

Penulis,

Agviana Hardinia

**PERANAN GREENPEACE DALAM PENOLAKAN
PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG TAHUN 2011-2013**

Disusun Oleh:

AGVIANA HARDINIA
NPM. 1044010009

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

Mengetahui

D E K A N

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**PERANAN GREENPEACE DALAM PENOLAKAN
PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG TAHUN 2011-2013**

Disusun Oleh:
AGVIANA HARDINIA
NPM. 1044010009

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juni 2014**

Pembimbing Utama

Tim Penguji:

1. Ketua

Dr.Jojok Dwiridotjahjono,S.Sos,M.Si
NPT. 370119500421

Dr.Jojok Dwiridotjahjono,S.Sos,M.Si
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

Juwito, S.Sos, M.Si
NPT. 367049500361

3. Anggota

Drs. Saifuddin Zuhri, M.Si
NPT. 370069400351

**Mengetahui,
D E K A N**

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ”. (QS. Al-Baqarah/2: 45)

“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu ”. (Umar bin Khattab)

*“Seseorang yang cakap,
namun rendah hati
seperti perhiasan yang
nilainya sama dengan
sebuah kerajaan.”
(William Penn)*

Halaman Persembahan

*Untuk papa tercinta Bambang Soehartono ST, mama tersayang
Agustina Hendraningrum, MBK Anjaliene Hartantina ST, ADK
Anandya Hartanningrum, my beloved Al-Kharitza Rahman Hakim.*

Love you as always

-Aguiana Hardinia-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Peranan Greenpeace Dalam Penolakan Pembangunan PLTU di Batang Tahun 2011-2013”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama dan Maria Indira A.S.IP.M.Hub.int, sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis. Penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa moril, spiritual maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dra. Hj Suparwati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Juwito, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Dr. Jojok D, S.Sos, M.Si selaku Ketua Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Resa Rasyidah S.Hub.Int,M.Hub.int, Pjs Sekretaris Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Norika Maurin Abriana selaku Kordinator Volunteer Greenpeace Indonesia.
8. Arif Fiyanto sebagai Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
9. Hikmat Suriatanwijaya sebagai Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia.
10. Orang Tua tercinta dan terkasih, terima kasih atas doanya dan dukungannya.
11. Dosen-Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai berbagai macam isu-isu dalam dunia internasional.

12. Sahabat-sahabatku di Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2010, terima kasih banyak atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis pada khususnya.

Surabaya, 24 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.4.1 <i>Level Analysis</i>	6
1.4.2 Landasan Pemikiran	8
1.4.2.1 Sistem Internasional.....	8
1.4.2.2 <i>Non Governmental Organization (NGO)</i>	11
1.4.3 Sintesis Pemikiran	14
1.5 Hipotesis	14
1.6 Metodologi Penelitian	15
1.6.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	15
1.6.2 Tipe Penelitian	19
1.6.3 Jangkauan Penelitian	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.5 Teknik Analisis Data	22
1.6.6 Sistematika Penulisan	24
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMBANGUN	
PLTU DI BATANG	25
2.1 Kebijakan Pemerintah Serta Perjanjian	
Dalam Pembangunan PLTU Batang	26
2.2 Potensi Pengolahan Batu Bara	29
2.2.1 Kelebihan Batu Bara Cair	33
2.2.2 Insentif Pemerintah	37

2.3 Pinjaman Kebijakan Pembangunan Bank Dunia	38
2.3.1 Inisiatif yang dipromosikan Kelompok Bank Dunia	
Mendukung Proyek PLTU Jawa Tengah	41
 BAB III PERANAN GREENPEACE DALAM MENGUBAH	
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG	45
3.1 Faktor Negatif PLTU Batang Menurut Greenpeace	46
3.2 Aksi Penolakan Greenpeace Serta Masyarakat Batang	50
3.3 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Batang	59
3.4 Greenpeace Mengubah Kebijakan Pemerintah	67
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 Kesimpulan	72
 DAFTAR PUSTAKA	75
 LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran	10
Gambar 2.1 Filosofi Pembangunan Batu Bara Cair Pada Proses NEDO <i>Liquefaction</i>	35
Gambar 2.2 Alur Pemrosesan Batu Bara Cair Melalui Proses <i>Brown Coal Liquefaction Technology</i>	36
Gambar 3.1 Siklus Hujan Asam Akibat PLTU	48
Gambar 3.2 <i>Proposed Batang Coal Plant</i>	50
Gambar 3.3 Aksi Warga Batang Di PTUN Semarang	51
Gambar 3.4 Aksi Teatrikal Greenpeace	53
Gambar 3.5 Kawasan Konservasi Laut Daerah Batang	62
Gambar 3.6 Aksi Masyarakat Batang Di Jakarta	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Produksi Batu Bara Indonesia	32
Grafik 3.1 <i>Coal Import By Country In Japan</i>	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan Batu Bara Dunia	30
Tabel 2.2 Cadangan Sumber Daya Energi Dunia Dan Indonesia	
Tahun 2010	32
Tabel 2.3 Ringkasan Langkah-Langkah Batu Bara	
Kelompok Bank Dunia Di Indonesia	43
Tabel 3.1 Perkiraan Emisi Tahunan	
Dari PLTU Batang	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	80
Lampiran 2 UUD	85
Lampiran 3 UU	88
Lampiran 4 INPRES.....	93
Lampiran 5 PERPRES	104

ABSTRAK

PERANAN GREENPEACE DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG TAHUN 2011-2013

Penelitian ini menelaah peranan Greenpeace dalam penolakan pembangunan PLTU di Batang tahun 2011-2013. Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk pembangunan PLTU berkekuatan 2000MW. Jika proyek besar ini tetap berlangsung maka dalam per tahun PLTU batang menyumbang emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram merkuri yang dapat menyebabkan hujan asam. Ribuan warga Batang serta Greenpeace berulang kali melakukan aksi dimulai dari wilayah setempat hingga menuju Jakarta di pusat pemerintahan. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode eksplanatif-kualitatif dengan mengambil pandangan dasar *civil society* sebagai dasar argumen dan sintesis teori dari teori sistem internasional, *Non Governmental Organization* (NGO), konsep *civil society*, kebijakan pemerintah, dan *decision making*. Dari pendekatan teoritik yang dimunculkan, bisa ditarik jawaban sementara yang pada dasarnya mengonfirmasi bahwa Greenpeace sebagai NGO dapat mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan PLTU di Batang.

Civil society terbentuk dari sebuah sistem internasional. Sistem internasional memiliki aktor yaitu *state* dan *non state*, di dalam *non state* terdiri dari individu, organisasi, dan grup. Greenpeace merupakan perwujudan *civil society non state* yang berada di dalam sistem internasional. *Civil society* juga diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat Batang. Greenpeace sebagai *Non Governmental Organization* ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Greenpeace mengawasi dalam bentuk melakukan riset dari rencana pembangunan PLTU batu bara di Batang. Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan (*empowering*) masyarakat untuk menjadi organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Greenpeace dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan demokratisasi. Pada akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres menunda pembangunan PLTU hingga 2014.

Kata Kunci : *Civil society*, NGO, kebijakan pemerintah, *decision making*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tahun 1971, adanya suatu motivasi dan visi untuk menjadikan dunia menjadi hijau dan damai, berawal dari sekelompok aktivis yang berlayar dari Vancouver, Kanada dengan kapal nelayan tua. Mereka adalah aktivis, pendiri dari Greenpeace. Mereka percaya bahwa setiap orang dapat melakukan perubahan. Misi mereka untuk menolak percobaan nuklir yang dilakukan AS di Amchitka. Sebuah pulau kecil di lepas pantai Alaska. Amchitka adalah tempat perlindungan terakhir 3000 berang-berang dan rumah untuk elang kepala botak dan hewan liar lainnya.¹

Walaupun mereka menggunakan kapal tua bernama Phyllis Cormack yang mengalami berbagai halangan sebelum sampai di Alaska, dalam perjalanan kegiatan mereka menimbulkan banyak perhatian publik. Uji coba Nuklir berakhir pada tahun yang sama dan pulau tersebut di deklarasikan menjadi suaka untuk burung.² Saat ini Greenpeace adalah suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk kampanye lingkungan secara global. Amsterdam, Belanda adalah kantor pusat dari Greenpeace, telah mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia, nasional dan kantor regional di 41 negara.³

¹ Situs Resmi Greenpeace (online) dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/about>. diakses pada 14 Februari 2014.

² Alexander, Glaser. 2007. "Effects of Nuclear Weapons". Washington DC. Princeton University

³ *Loc Cit* Greenpeace (online) dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/about>.

Greenpeace memiliki landasan prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam setiap aksi kampanye lingkungan Greenpeace, di seluruh dunia. Prinsip tersebut pertama melakukan aksi atas kerusakan lingkungan dengan cara yang damai tanpa kekerasan, yang kedua adalah menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan untuk meningkatkan perhatian dan debat publik mengenai isu lingkungan, yang ketiga adalah dalam mengekspos ancaman terhadap lingkungan dan mencari solusi Greenpeace tidak memiliki sekutu permanen ataupun lawan, yang keempat adalah menjamin independensi sumber keuangan dari kepentingan politik atau komersial, yang kelima adalah mencari solusi untuk mempromosikan secara luas dan menginformasikan perkembangan dari pilihan untuk lingkungan di sekitar masyarakat.⁴ Dalam mengembangkan strategi kampanye dan kebijakan, Greenpeace menaruh perhatian besar untuk mencerminkan dasar untuk menghormati prinsip-prinsip demokratis dan untuk mencari solusi dalam meningkatkan keadilan secara global.

Di tahun 1970, komite dari "*The Don't Make A Wake*" telah menetapkan untuk menghentikan uji coba senjata nuklir kedua di pulau Amchitka di Aleutians. Pendiri dari komite dan anggota pertama adalah Paul Cote, mahasiswa hukum di Universitas British Columbia, yang kedua adalah Jim Bohlem, mantan nahkoda kapal selam dari operator radar di angkatan laut Amerika Serikat, Irving Stowe, seorang Quaker dan Yale educated Lawyer, Patrick Moore, mahasiswa ekologi di Universitas British Columbia, dan terakhir Bill Darnell, seorang pekerja sosial.⁵

⁴ Paul Wapner. 2010. "Living Through the End of Nature". London. The MIT Press. Hlm 64.

⁵ Situs Resmi Greenpeace [online] dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/about>. diakses pada 14 Februari 2014.

Selama dua dekade, Mc Taggart melawan pemerintah Perancis atas uji coba nuklirnya di laut dan di pengadilan. Pada akhirnya dia menjadi pemimpin Greenpeace untuk seluruh dunia. Pada saat para pendukung Greenpeace nasional dan regional di setiap negara melakukan suatu perlawanan maka semua akan saling bantu-membantu.⁶

Perhatian utama dari Greenpeace telah berkembang pada isu-isu lingkungan yang lebih luas. Bentuk dari aksi yang mereka lakukan adalah kampanye secara terstruktur. Mereka memiliki perwalian dengan mengumpulkan perwalian dari seluruh cabangnya di dunia untuk kemudian menghasilkan kebijakan organisasi. Melalui ini kampanye akan dikoordinasi secara internasional, kemudian koordinator proyek dari masing-masing kawasan akan menindaklanjuti, di tingkat terakhir tenaga kampanye yang juga banyak di isi sukarelawan digerakkan di negara masing-masing. Semua tindakan yang dilakukan adalah *non-violence action*. Semua aksi tersebut dengan harapan akan dapat memanipulasi nilai-nilai, norma yang berkembang ditengah masyarakat ke arah penghormatan masyarakat dunia pada integritas ekologi planet⁷. Pada dasarnya ini hanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Greenpeace. Lebih jauh lagi aktifitas ini justru dapat meyakinkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan-perusahaan, organisasi swasta dan masyarakat luas untuk membuat suatu penyikapan terhadap lingkungan dengan lebih baik.

Greenpeace bergerak pada 5 bidang yaitu laut, perubahan iklim, nuklir, hutan, bahan kimia beracun. Sebagai contoh peranan Greenpeace dalam menjaga

⁶ *Ibid*

⁷ Paul, Wapner. 2000. "Greenpeace and Political Globalism", dalam Frank J. Lechner and John Boli (ed.), *The Globalization Reader*, Blackwell Publisher.

lingkungan dengan mempromosikan revolusi energi, mempertahankan keberlangsungan kehidupan samudra, menjaga hutan-hutan tua di dunia, bekerjasama untuk melakukan pelucutan senjata nuklir dan perdamaian dunia, hingga mempromosikan masa depan yang bebas dari racun. Salah satu aksi Greenpeace mempromosikan masa depan yang bebas dari racun, perubahan iklim hingga keberlangsungan hidup laut dengan penolakan pembangunan menggunakan batu bara.

Proyek PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek pertama yang dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.⁸ Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Pemberian Jaminan Pemerintah (PJP) untuk proyek PLTU Jawa Tengah merupakan langkah maju dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih transparan dan akuntabel melalui PT PII sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah.⁹ Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek.

⁸ Situs Resmi PLN (Persero) [online] dalam PT PLN (Persero).htm//Proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW _ diakses pada 21 April 2014.

⁹ *Loc Cit* Situs Resmi PLN (Persero) [online] dalam PT PLN (Persero).htm

Proyek ini diperkirakan mulai beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016.¹⁰

Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Jepang pada 6 Oktober 2011 untuk pembangunan PLTU berkekuatan 2000MW. Lokasi yang dipilih adalah Jawa Tengah yang akan dibangun PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan tersebut berlangsung di wilayah Batang, PLTU ini menelan biaya sekitar US\$4 miliar. Jika proyek besar ini tetap berlangsung maka dalam per tahun PLTU batang menyumbang emisi karbon 10,8 juta ton dan 226 kilogram merkuri yang dapat menyebabkan hujan asam.¹¹ Tidak hanya mengancam lingkungan pembangunan PLTU juga berdampak pada mata pencaharian warga Batang sekitar terutama nelayan dan petani.

Ribuan warga Batang Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi, berulang kali melakukan aksi dimulai dari wilayah setempat hingga menuju Jakarta di pusat pemerintahan. Aksi tersebut dilakukan salah satu alasannya adalah pengajuan gugatan ke PTUN terhadap keputusan bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban.¹² Dalam aksi ini, warga Batang mendesak agar Bupati Batang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan warganya di atas kepentingan investor PLTU Batubara. Dalam aksinya, warga Batang yang didukung oleh aktivis dari LBH Semarang dan Greenpeace Indonesia

¹⁰ *Loc Cit* Situs Resmi PLN (Persero) [online] dalam PT PLN (Persero).htm

¹¹ Situs Resmi Greenpeace [online] dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/about>. diakses pada 14 Februari 2014.

¹² Situs Resmi Climate Justice Save Our Local [online] dalam <http://www.beritalingkungan.com/2012/09/aktivis-lingkungan-sorot-rencana.html>. diakses pada 21 April 2014

kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis membahas mengenai ancaman yang akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Batang. Ancaman perubahan iklim lingkungan terjadi jika pembangunan PLTU dilanjutkan. Penolakan dari Greenpeace juga didukung oleh ribuan masyarakat Batang untuk menolak dibangunnya PLTU di wilayah tersebut. Sehingga ada pertanyaan yang hendak dicapai oleh Peneliti, yaitu **bagaimana peranan Greenpeace dalam perubahan kebijakan pembangunan PLTU di Batang tahun 2011- 2013?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penjelasan yang hendak dicapai oleh penulis, antara lain :

1. Menjelaskan mengenai penolakan pembangunan PLTU di Batang.
2. Menjelaskan peranan Greenpeace menolak pembangunan PLTU di Batang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Level Analysis*

Level of Analysis adalah alat-alat/instrumen heuristik yang membantu peneliti atau penulis dalam mempelajari subyek yang sedang diteliti. Hampir semua disiplin ilmu atau kajian penelitian dalam hubungan internasional menggunakan *Level of Analysis*, meskipun *Level of Analysis* yang digunakan sangat bervariasi

dan tergantung pada disiplin penelitian yang teliti.¹³ Menurut Laura Neack, *Level of Analisis* yang digunakan dalam suatu kebijakan luar negeri meliputi yaitu *National self-image, culture*, individu, *single group* atau *small group*, politik domestik, opini publik dan juga *Great powers* (mengenai posisi suatu negara dan kekuatan, siapa yang menjadi negara-negara besar atau yang berpengaruh).

Menurut Cicero *Civil society* ialah suatu komunitas memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi¹⁵.

Konsep masyarakat sipil yang melandasi penelitian ini pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Sejumlah karakteristik penting entitas masyarakat sipil memiliki ciri-ciri utama, yakni otonomi politik

¹³ Laura Neack. 2008. “The New Foreign Policy: power seeking in a globalized era”. (United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.). Hal 11-12.

¹⁴ Affan, Gafar. 2006. *Politik Indonesia; Transisi menuju Demokrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2007. Jakarta : DPR RI.

berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan (*self supporting*), dan keswasembadaaan (*self generating*).¹⁶

Penelitian ini menggunakan *civil society* sebagai *level of analysis*. Cohen dan Arato mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan¹⁷. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme “privat”, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*). Gramsci mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil – “*the state should be understood not only as the apparatus of the government, but also the private apparatus of Civil Society*” (negara tidak harus dipahami hanya sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).¹⁸

1.4.2 Landasan Pemikiran

1.4.2.1 Sistem Internasional

Sistem Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antar negara bangsa. Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan

¹⁶Gellner, Ernest, 1995. "The Importance of Being Modular", dalam John A. Hall, *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

kompleks¹⁹. Jika definisi tersebut dipadukan dengan konsep sistem internasional, maka dapat dikatakan bahwa komponen pembentuk sistem internasional adalah negara bangsa. Dalam sistem internasional, setiap negara bangsa harus saling berinteraksi satu sama lain melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara bangsa. Kemampuan membuat perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara yang mempunyai serangkaian kapabilitas, misalnya tingkat ekonomi yang besar, teknologi, kekuasaan politik, serta kekuatan militer yang kuat.²⁰ Adanya perjanjian antarnegara yang disetujui masing-masing pihak inilah yang akan menciptakan interaksi sehingga sistem internasional dapat terwujud.

Sistem internasional menurut George Sorensen sebagai perangkat hubungan internasional yang telah dipola sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan kondisi internasional. Sistem internasional bertugas untuk mewadahi segala praktik diantaranya politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional dan sebagainya. Hubungan internasional juga memiliki aktor-aktor, di antaranya ada aktor-aktor yang resmi seperti negara ataupun yang tidak resmi adalah individu, organisasi, dan kelompok.²¹

Sistem internasional pada pendektan liberalis berfokus pada institusi dan jaringan kerja. Sistem itu sendiri terbentuk lewat perkembangan yang kompleks

¹⁹ Marjike Breuning. 2007. "Foreign Policy Analysis A Comparative Introducton". New York. British Library. Hlm 142.

²⁰ *Ibid* hlm 151.

²¹ George, Sorensen. 2006. "What kind of World Order?" dalam *The International Sistem in the New Millennium*, Journal of the Nordic International Studies Association, 41 (4):pp 343.

dari segala bentuk hubungan lintas batas antara individu dan kelompok²². Bentuk hubungan lintas batas antara individu dan kelompok adalah dengan adanya kerjasama ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang dilakukan dua aktor atau lebih dalam sistem internasional. Sistem internasional dipandang lebih memberikan perdamaian karena yang ada bukan hanya Negara dengan egonya saja, tetapi juga individu dan kelompok yang tergabung di dalamnya. Sistem tidak hanya berasal dari *balance of power* atau hanya berasal dari institusi internasional, tetapi sistem internasional ini juga berasal dari nilai-nilai domestik serta prinsip-prinsip yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat di dalam suatu Negara²³.

Sistem internasional memiliki aktor yang paling kuat yaitu negara. Negara memiliki keterlibatan di berbagai hal seperti keterlibatan di bidang ekonomi, infrastruktur dengan mendorong perusahaan swasta untuk modal investasi menurut Lenter.²⁴ Inisiatif dari NGO dalam membuat kebijakan dapat dilakukan koalisi dengan pemegang kuasa negara karena dalam sistem internasional perjuangan politik global sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dengan adanya lembaga, ideologi, otoritas, demokrasi, hak asasi manusia, hukum, keadilan, kesetaraan, rezim, legitimasi, kedaulatan, kewarganegaraan, *civil society*.²⁵

Dalam sistem internasional isu-isu regional, isu-isu global dan interaksi multilateral antar negara juga dimainkan oleh peranan organisasi dan aktor non

²² George, Sorensen. 2006. "What kind of World Order?" dalam *The International Sistem in the New Millennium*, Journal of the Nordic International Studies Association, 41 (4):pp 350.

²³ *Ibid* 353

²⁴ Hallie, Jones. 2005. "Power and Politics in Globalization". Critical Essay. Hlm 2

²⁵ *Ibid* Hlm 3

negara seperti NGO.²⁶ Salah satu contoh isu-isu regional dan global adalah lingkungan, dengan adanya kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera menyebabkan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia terkena dampak asap kemudian perlu diadakannya interaksi multilateral antar negara yang terlibat serta pihak lainnya yang menyebabkan kebakaran hutan.

1.4.2.2 Non Governmental Organization (NGO)

Menurut Budiman ada dua jenis NGO, yakni *pertama*, NGO yang bersifat karitatif: dalam pengertian ini NGO hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak ada perubahan pada masyarakat itu sendiri. *Kedua*, NGO yang berusaha memberdayakan (*empowering*) masyarakat.²⁷ Sasarannya partisipasi, agar rakyat dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan demokratisasi. Hal ini dilakukan pada tingkat lokal, pada tingkat nasional di pemerintahan pusat dan pada tingkat internasional atau global. Sedangkan menurut Korten kehadiran NGO adalah sebagai salah satu cara untuk memperkuat rakyat, sehingga mampu menentukan arah pembangunan menuju transformasi pembangunan.²⁸

Keberadaan NGO sebagai salah satu lembaga di luar pemerintah, selama ini mampu menjembatani dan mengakomodir serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk perwujudannya dapat melalui pelaksanaan suatu program yang ditujukan untuk memberdayakan

²⁶ Laura Neack. 2008. "The New Foreign Policy: power seeking in a globalized era". (United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.). hlm 11.

²⁷ Arief, Budiman, 1996., *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia

²⁸ David C, Korten. *Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global* (Terjemahan Lilian Teja Sudhana), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

masyarakat dan meningkatkan kehidupan ekonomi.²⁹ Menurut Sajogyo bahwa NGO memiliki peranan yang cukup penting sebagai pelaku dalam pembangunan negara, disamping lembaga-lembaga yang dibina langsung oleh pemerintah. Salah satu fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam.³⁰ Para aktivis organisasi masyarakat sipil dan NGO menyadari peran sosial sebagai pengawas negara. Asumsi yang diterima secara umum adalah kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah seharusnya dibatasi dengan berbagai instrumen, termasuk pembatasan oleh masyarakat dengan pengawasan melalui media massa dan NGO.³¹

Tujuan dibentuknya NGO sendiri tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. NGO bekerja di dalam banyak sektor baik di lingkup nasional maupun internasional. Betsill dan Corell melihat bahwa NGO dapat berdiri dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain; pertama meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu di sekitar, kedua melobi para pembuat keputusan, mampu untuk mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar negeri, ketiga mampu untuk berpartisipasi di dalam dan beberapa tujuan lain. Tujuan-tujuan ini kemudian diselaraskan dengan isu-isu spesifik yang menjadi konsentrasi dari dibentuknya sebuah NGO.³²

²⁹ Sajogyo, P. 1990. Partisipasi LSM dan LPSM Dalam Pembangunan di Pedesaan Jawa Barat. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.

³⁰ *Ibid*

³¹ NN.Tt. *The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. London: The MIT Press.

³² Elisabeth, Corell dan Michele M. Betsill. 2001. "NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis" dalam *Global Environmental Politics* 1:4, November 2001. Massachusetts Institute of Technology

Keberadaan dan posisi NGO ini turut mengubah relasi antara negara dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi yang saat ini lebih banyak diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Adanya NGO semakin menumbuhkan minat terhadap perkembangan demokrasi di dunia internasional.³³ Masyarakat mencoba menyampaikan aspirasinya melalui lembaga-lembaga non profit seperti NGO. Sehingga peran NGO menjadi lebih besar lagi di dalam pengambilan keputusan di sebuah negara.

NGO yaitu organisasi di luar pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁴ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.³⁵ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.³⁶ NGO menjadi media aspirasi bagi masyarakat untuk dapat bersuara dan menentukan kebijakan pemerintah. Dengan adanya NGO banyak isu-isu yang seingkali luput dari perhatian pemerintah dapat menjadi terangkat kembali. Seperti isu lingkungan, kesadaran akan penyakit, energi, dan lain-lain.

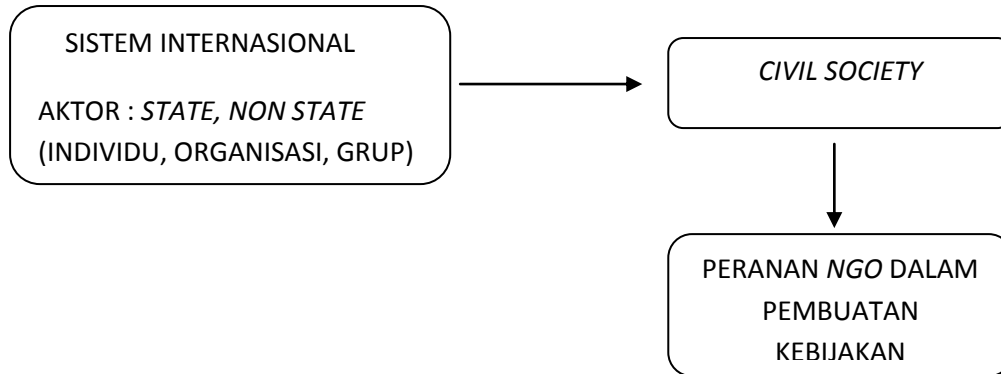
³³ Elisabeth, Corell dan Michele M. Betsill, "Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats", dalam Betsill, Michele M. and Elisabeth Corell (ed.), 2008, *NGO Diplomacy*:

³⁴ DR.Ir. Suhatmansyah IS, Msi. 2009. Pembinaan Organisasi Mitra Pemerintah. Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik: Departemen Dalam Negeri.

³⁵ Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 C Ayat 2 Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, 1945. Jakarta : DPR RI.

³⁶ Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat 3 Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, 1945. Jakarta : DPR RI.

1.4.3 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 : Sintesa pemikiran

Sintesa pemikiran dalam penelitian ini yaitu, *civil society* terbentuk dari sebuah sistem internasional. Sistem internasional memiliki aktor yaitu *state* dan *non state*, di dalam *non state* terdiri dari individu, organisasi, dan grup seperti yang terdapat pada segitiga analisis kebijakan menurut Gilson L.³⁷ NGO adalah bagian dari *social political governance* dari, oleh, dan untuk masyarakat guna menetapkan *civil society*. Hubungan yang demokratis antara negara dan masyarakat dapat tumbuh lewat perkembangan NGO.

1.5 Hipotesis

Menurut sintesa pemikiran diatas menyatakan bahwa peran Greenpeace sebagai *Non Governmental Organization* ikut mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah supaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk menjadikan dunia hijau dan damai demi keberlangsungan hidup untuk generasi penerus. Greenpeace merupakan NGO yang memberdayakan

³⁷ Gilson L dan Walt G. 1994. Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning* 9: 353-70

(*empowering*) masyarakat untuk menjadi organisasi terbuka akan informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai maka perlu dilakukan pendekatan *decision making* yang dapat merumuskan suatu kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Greenpeace dapat terbentuk karena adanya partisipasi dari *civil society* sehingga organisasi tersebut dapat bergerak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki organisasi tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi

1.6.1.1 Konsep *Civil Society*

Definisi Konseptual : Konsep *Civil Society* yaitu *Civilis societs* merupakan masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hukum. Pengertian ini erat kaitannya dengan konsep warga Romawi yang hidup di kota-kota yang memiliki kode hukum (*ius civile*), sebagai ciri masyarakat beradab dibanding dengan warga di luar Romawi yang dianggap belum beradab menurut Cicero.³⁸ *Civil society* adalah bagian dari tatanan politik secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik lain adalah negara (*state*). *Civil society* yang dimaksud adalah perkumpulan merdeka antara seseorang yang membentuk *bürgerliche gesellschaft* (*bourgeois society*). Bagi Hegel, negara adalah perwujudan “jiwa mutlak” (*absolute idea*) yang bersifat unik karena memiliki logika, system berpikir dan berperilaku tersendiri yang berbeda dengan lembaga politik lain (*civil*

³⁸ Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi menuju Demokrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

society).³⁹ Civil society adalah “.....masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara”.⁴⁰

Konsep *Civil Society* menjadi hal yang penting karena *civil society* memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, adalah bagian dari masyarakat yang berbeda dari dan independen dari negara. *Kedua*, memberikan hak individu dan terutama hak kepemilikan. *Ketiga*, *civil society* adalah konstelasi dari banyak unit ekonomi atau firma bisnis yang otonom, berfungsi secara independen dari negara dan bersaing satu sama lain. Satu karakteristik tambahan, satu komunitas politik. *Civil society* membawa ide kewarganegaraan, warga dengan hak untuk menjabat satu posisi publik dan berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan tentang masalah publik.

Definisi Operasional : Dalam penelitian ini, konsep civil society di wujudkan dalam bentuk Greenpeace sebagai NGO. Dalam mengejar misinya, Greenpeace tidak memiliki musuh dan aliansi yang permanen. Namun Greenpeace akan selalu menjadi organisasi yang terbuka untuk informasi, perdebatan, dan lainnya dalam rangka mengembangkan suatu bentuk pertukaran atau transfer ilmu pengetahuan. Greenpeace menggunakan data-data riset, upaya-upaya lobi dan diplomasi untuk mengejar tujuannya.

1.6.1.2 Kebijakan Pemerintah

Definisi Konseptual : Kebijakan pemerintah yaitu sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ J. David Singer. 1961. “The level of Analysis Problem in International Relations”. (World Politic : vol 14 no 1).

menurut kebijakan dalam Kybernology.⁴¹ Lembaga-lembaga swadaya atau yang lazim disebut NGO memiliki fungsi sebagai aktor *social pressure* dalam sebuah kebijakan pemerintah di Indonesia, untuk meningkatkan *bargaining power* terhadap kekuatan sosial dan politik sehingga NGO dapat memperoleh keuntungan maksimal sesuai peranannya.⁴² Kebijakan pemerintah adalah pilihan terbaik untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan meningkat secara formal, etik, dan moral, hal tersebut diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan. Setiap langkah dalam proses kebijakan, fungsi, rute, dan siklus kebijakan pihak yang diperintah terlibat atau dapat dilibatkan.⁴³

Kebijakan pemerintah menjadi hal yang menarik karena pada prinsipnya kebijakan pemerintah dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Definisi Operasional : dalam penelitian ini, kebijakan pemerintah diwujudkan dalam program infrastruktur Bank Dunia di Indonesia menetapkan kebijakan dan subsidi untuk pemerintah yang mempromosikan pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara lebih dari 16 GW sebelum

⁴¹ Taliziduhu Ndraha.2003.” Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)”. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Hal :493.

⁴² *Ibid* hal 496

⁴³ *Ibid* hal 498

mengembangkan alternatif energi terbarukan. pemilihan lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 2x1.000 MW harus menghindari kawasan lindung, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang bisa berdampak serius terhadap proses dan prosedur penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek. Rencana lokasi pembangunannya tidak di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang, namun di pantai Desa Ujungnegoro, Roban sampai Depok Kecamatan Roban.

1.6.1.3 *Decision Making*

Definisi Konseptual : *Decison Making* yaitu proses tawar-menawar antara pemerintah dengan agen pemerintah lainnya. Dimana proses tersebut saling mengemukakan alternative untuk menetapkan kebijakan pemerintah. Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.⁴⁴ Ada beberapa macam nilai yang melandasi *decision making* dalam membuat suatu keputusan, yaitu: 1) nilai-nilai politik, keputusan-keputusan dibuat atas dasar kepentingan dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu; 2) nilai-nilai organisasi, keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; 3) nilai-nilai pribadi, seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya; 4) nilai-nilai keputusan, keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat

⁴⁴ Allison, Graham. 1999. *Essence of Decision :Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition. New York : Longman (google ebook)

keputusan tentang kepentingan publik atau pembuat keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan; dan 5) nilai-nilai ideologi, nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan keputusan.⁴⁵

Decision making digunakan karena pengambilan keputusan sebagai konsep yang menyangkut keputusan-keputusan pada proses yang terjadi sampai keputusan tercapai. *Decision making* yang dimaksud mengenai tindakan umum atau nilai-nilai mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa.

Definisi Operasional : dalam penelitian ini yang disebut *decision making* terdapat pada proses tawar menawar yang terjadi antara pemerintah dan pemilik investasi. *Decision making* terwujud salah satunya ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman dana meskipun Bank Indonesia telah sepakat tidak akan mendanai proyek batu bara.

1.6.2 Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis. Kemudian, data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu *valid*, *reliable* dan juga obyektif.⁴⁶ Menurut Prof. Dr. Sugiyono, bermacam-macam metode penelitian yang dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tipe metode penelitian Kuantitatif,

⁴⁵ Marjike Breuning. 2007. "Foreign Policy Analysis A Comparative Introducton". New York. British Library. Hlm 153.

⁴⁶ Prof. Dr. Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung : Alfabeta CV. Hal :3.

metode penelitian Kualitatif dan juga metode penelitian Kombinasi (*mixed methods*).⁴⁷

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti sebagai instrument utama untuk pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data, serta memfokuskan perhatian pada proses dan arti dari suatu peristiwa yang diteliti.⁴⁸ Dalam pendekatan metodologi penelitian Kualitatif, penelitian dapat dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pengumpulan data (*Data Colloective*), pengolahan data (*Data Analysis*), Laporan penelitian (*report writing*).⁴⁹ Berdasarkan karakteristiknya, penelitian kualitatif dapat dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, melakukan analisis data secara induktif dan juga lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).⁵⁰

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai tipe penelitian eksplanatif. Didasarkan pada acuan literatur penelitian eksplanatif, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel⁵¹. Dalam penelitian ini digunakan proses kebijakan

⁴⁷ *Ibid.* Hal: 9-10.

⁴⁸ *Ibid.* Hal : 13.

⁴⁹ John W. Creswell. 2009. "*Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*". California: Sage Publications. Hal: 148-161.

⁵⁰ Prof. Dr. Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung : Alfabeta CV. Hal : 15.

⁵¹ Silalahi, (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.

pemerintah dalam *decision making* PLTU di Batang sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen diwakili oleh peranan Greenpeace dalam penolakan.

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan sesuatu yang bersifat tentatif namun cukup krusial dan menentukan bagi proses penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi di tahun 2011-2013. Pemilihan ini didasarkan awal perjanjian dibuat pada tahun 2011 hingga munculnya kebijakan penghentian sementara pembangunan PLTU di batang pada tahun 2013. Perkembangan pembangunan PLTU di Batang setelah 2013 masih sangat dimungkinkan sehingga penelitian ini tidak bersifat final dan diharapkan akan dilanjutkan pada penelitian selanjutnya dengan fakta-fakta yang lebih baru.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sehingga, teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan untuk memenuhi standar data yang akan ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁵² Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan juga sumber sekunder.⁵³ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan

⁵² Prof. Dr. Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (*mixed methods*)". Bandung : Alfabeta CV. Hal : 308.

⁵³ *Ibid*

selanjutnya, dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan juga gabungan keempatnya.⁵⁴

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari *website-website* resmi. Sedangkan data sekunder lebih didapatkan dari *literature review* atau *jurnal* penelitian dari berbagai sumber-sumber seperti koran, majalah, buku, ataupun artikel atau berita di internet.⁵⁵ Sehingga, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Primer dengan mendapatkan data-data dari website resmi Greenpeace Indonesia. Kemudian menggunakan data Sekunder, yaitu dengan mendapatkan dari *literature review* atau *Jurnal* yang berhubungan dengan Greenpeace dan juga yang terkait dengan materi dan teori yang digunakan, serta menggunakan buku seperti buku metode penelitian sebagai acuan dalam sistematika penelitian atau penulisan.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca atau diri sendiri. Analisa data kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ W. Laurence Neuman. 1991. "*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*". Boston : Allyn and Bacon. Hal : 219.

dikembangkan menjadi hipotesis.⁵⁶ Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1984), aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.⁵⁷

Data *Reduction* atau Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.⁵⁸ Data Display (Penyajian Data), yaitu Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁹ Dengan menggunakan *display* data, maka akan berguna untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi atau *Conclusion Drawing Verification*, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁰

⁵⁶ Prof. Dr. Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung : Alfabeta CV. Hal : 333.

⁵⁷ *Ibid* hlm 334.

⁵⁸ *Ibid* hlm 336-337.

⁵⁹ *Ibid* hlm 339.

⁶⁰ *Ibid* hlm 343.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan skripsi ini, dapat dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut; Dalam bab I pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau pertanyaan masalah, tujuan dari penelitian, kerangka pemikiran atau landasan pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yang juga terkait dengan peringkat analisis dan juga landasan teoritik, dan dilengkapi dengan hipotesa serta metodologi penelitian.

Bab 2 merupakan kebijakan pemerintah membangun PLTU di Batang.

Bab 3 merupakan peranan Greenpeace dalam mengubah kebijakan pembangunan PLTU di Batang.

Bab 4 terdiri atas sintesis dari penelitian ini yang merupakan kesimpulan dan implikasi.